

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bagir Manan. *Sitem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, FH UII, Cet 1 Yogyakarta, 2005
- Bambang Sugianto, "Pendaftaran Tanah Adat Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kab. Kepahiang" *Jurnal Panorama Hukum*, Vol,2 No.2, Des. 2017.
- Boedi Harsono, (*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang POkok Agraria. Isi dan pelaksanaannya*), Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Djambatan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita.Jakarta, 1981,
- Hadikusuma, Himan. 2006. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: PT alumni
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- H.M. Koesnoe, 2000. *Prinsip-Prinsip Hukum adat tentang Tanah*, Surabaya: Ubaya Pres
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia,
- Irwandi, *pergeseran Hukum Adat dalam Pemanfaatan Tanah UlayatKaum di Kecamatan Banu Hampu*, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press,
- Peter mahmud Mazuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008,
- Pide, a Suriyaman Mustari (2014) *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Group.

P. Perlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1993)

Bushar Muhammad, *Pokok Pokok Hukum Adat, Pradnyaparamita*, Jakarta, 1981.

FX. Sumarja, S.H., M.H, "*Hukum Pendaftaran Tanah*", Universitas Lampung Bandar Lampung, 2010.

Riya Ayu Novita, *Evektivitas Pelaksanaan Undang*

Siregar, Ansari, 2011. *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Pres, Jakarta 1986.

Soekanto, Sorjono. 1993. *Beberapa teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. PT Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soetomo, *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981.

Soekanto, Sorjono. 1993. *Beberapa teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. PT Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suteki dan Galang Taufani, *Metedologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Pajawali Pers, Depok, 2018

Sudiyat, Imam. *Hak Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta: libery.

Umar Said, Suratman dan Noorhudha Muchin. 2017

B. JURNAL

Ade Parlaungan Nasution, *Penyuluhan Hukum Mnafaat pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat Desa Hasang*, Jurnal Ika Bina En Pabalo, Vol 1, No 2, Juli 2021.

Ady Hendra Lumban Tobing, "Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir" *Jurnal of Education, Humaniora and social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 2, 2021.*

Indah Mahniasari, "Pendaftaran Tanah Adat" *Jurnal-Al-Adli: Jurnal Hukum*, Vol, V, No 3, 2013.*

Maria S.W Sumardjono “Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru dibidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis property dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan c. Pratama, Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam Production Contract Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009.*

Novyta Uktolseja, Tinjauan Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang) Fakultas Hukum Univ. Pattimura, Ambon. Vol. 25 No. 1, 2019 *

Nurhasan Ismail, “arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat” Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, No. 1, (Januari-April)*

Rosmidah, Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya, Inovatif. Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4 (2010): Inovatif *

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1959, Tentang Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Rugian Perusahaan_perusahaan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi dan Cara Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 (pasal 1 angka 7) dan (Pasal 1 angka 18) Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

D. INTERNET

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/download/313/365>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41551/3/Chapter%20II.pdf>,

LN.2021/No.28, TLN No.6630, jdih.setkab.go.id.